

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan

Syarifa Khasna *

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

syarifa.khasna@iainpekalongan.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2021-02-10

Revised 2020-06-04

Accepted 2020-06-30

Keywords

Evaluation Policy, Batik-Waste Management, Pekalongan

ABSTRACT

Development of batik industry in Pekalongan have diverse effects. From the economic improvement to environmental issues. Batik industry producing waste that could potentially pollute the environment. So, The Government of Pekalongan made local regulation about Protection and Environmental Management Pekalongan. The purpose of this policy is to create the environment Pekalongan good and healthy. Various efforts have been made by the government to decrease the pollution with installation of waste water management.

This study discuss about policy evaluation batik-waste management in Pekalongan. In order to explain the results of the policy evaluation batik waste management used a qualitative research method. Subjects in this study is the government represented by the Environment Agency Pekalongan, batik entrepreneurs and communities. The method of data collection is through interviews and observations made by the selection of respondents using purposive sampling method.

Based on the evaluation by Inputs, Process, Outputs, Outcomes can be concluded that the batik-waste management policy in Pekalongan unsuccessful. It is caused by several factors such as the limited funds so that complicates the motion of the government to make some facilities and also of the low participation of batik businessman in Pekalongan.

PENDAHULUAN

Kota Pekalongan merupakan sentral penghasil kerajinan batik terbesar di Indonesia sehingga mendapat sebutan sebagai Kota Batik. Kota Pekalongan memiliki jumlah UMKM yang didominasi oleh industri garmen dan batik yaitu sekitar 90,10 % dari keseluruhan jumlah industri yang ada (Disperindagkop Kota Pekalongan, 2018). Industri batik merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdapat sekitar 45.000 warga masyarakat Kota Pekalongan bekerja di sektor industri yang sebagian besar merupakan industri batik.

Perkembangan industri batik memberikan dampak yang beragam mulai dari peningkatan ekonomi sampai isu lingkungan. Sebagai industri kecil dan menengah, kerajinan batik memproduksi limbah industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari produksi batik langsung tersebar ke sungai, akibatnya air tercemar oleh bahan kimia yang mengancam lingkungan. Limbah industri batik mengandung bahan kimia yang akan mengendap di sungai sehingga tidak ada yang bisa mendorong dan membuangnya ke laut. Endapan tersebutlah yang menjadikan air sungai berwarna hitam-hitaman dan memunculkan bau yang menyengat. Selain masalah pencemaran di sungai, ternyata limbah batik tersebut juga menyebabkan sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Dampak jangka pendek air akan keruh karena limbah batik, namun untuk dampak



jangka panjang akan merusak tanah disekitar aliran sungai serta dapat mematikan ekosistem air sungai.

Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam rangka mengatasi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah batik. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang baik dan sehat. Pada Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 disebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.

Adapun upaya yang dilakukan Pemkot Pekalongan untuk mengatasi pencemaran air limbah batik salah satunya dengan mewajibkan pemilik usaha batik membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL merupakan sebuah sarana untuk menetralsir kandungan racun yang ada di dalam air. Pembangunan IPAL ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan polusi terutama polusi air. Namun permasalahannya adalah masih banyak unit usaha batik yang tidak membangun IPAL untuk mengelola limbah yang dihasilkan.

Salah satu kendala dari pembuatan IPAL ini adalah biaya yang sangat mahal sehingga sulit dijangkau mengingat industri batik di Kota Pekalongan mayoritas adalah usaha kecil. Akan tetapi, Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengupayakan dengan membangun IPAL komunal di sentra industri batik diantaranya di Kelurahan Jenggot dan Kelurahan Kauman. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan disebutkan bahwa kapasitas IPAL komunal di Kelurahan Jenggot hanya 400 m³ sedangkan limbah cair yang diproduksi 48 unit usaha batik di kelurahan tersebut mencapai 2.000 m³ setiap hari. Sementara di Kelurahan Kauman terdapat 28 unit usaha batik dimana setiap hari memproduksi limbah cair sebanyak 200 m³ sedangkan, kapasitas IPAL komunal hanya 130 m³ (Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014).

Mengingat kompleksnya permasalahan tentang pencemaran air limbah batik di Kota Pekalongan, maka peneliti berusaha untuk mengetahui, meneliti, mengkaji serta memecahkan permasalahan tersebut dengan judul : “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich sebagaimana dikutip oleh (Dwiyanto, 2009) merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Thomas Dye dikutip dalam (Subarsono, 2005) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari *public policy* tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah namun termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat jika pemerintah mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap isu atau

masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, tindakan tidak melakukan apa-apa merupakan *policy* yang diambil pemerintah.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam (Dunn, 2000) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*. Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Dalam mengeluarkan suatu kebijakan publik, pemerintah daerah selain harus memperhatikan sinkronisasi peraturan daerah tersebut dengan kebijakan nasional, juga harus memperhatikan kesinambungan antar tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan kajian yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. James Anderson dalam (Subarsono, 2005) menetapkan proses kebijakan sebagai berikut:

1. Formulasi Masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

Banyak yang mengira bahwa siklus kebijakan akan berakhir setelah dilakukan evaluasi, namun dengan adanya evaluasi akan memunculkan agenda kebijakan baru dengan optimisme dan pertimbangan-pertimbangan baru. Dengan demikian, pengambil kebijakan harus memahami siklus atau tahapan dan dinamika kebijakan publik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2007) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaann kebijakan tersebut. Sedangkan menurut William Dunn (2000), evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi

kebijakan dilakukan setelah implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Untuk menilai keberhasilan kebijakan perlu dilakukan pengukuran melalui beberapa indikator. Hal ini dikarenakan, apabila hanya menggunakan satu indikator saja maka hasil penilaiannya akan bias. Secara umum Bridgman & Davis (Badjuri, 2002) mengemukakan evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator pokok, yaitu indikator *input*, *process*, *outputs*, dan *outcomes*:

1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur lainnya.
2. Indikator *process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya.
4. Indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah dalam jangka panjang penduduk miskin dapat *empowered* sehingga mampu keluar dari lingkungan kemiskinan? Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dalam jangka lama? Demikian seterusnya.

Indikator-indikator tersebut terintegrasi pada masing-masing tipe evaluasi dimana evaluasi nantinya akan menghasilkan rekomendasi apakah sebuah kebijakan publik layak diteruskan, dipertahankan atau dihentikan sama sekali.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan berdasarkan *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari tiga sumber yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sumber data pemerintah dikumpulkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan dinas/kantor lain di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Sedangkan sumber data dari unsur swasta adalah pengusaha batik di Kota Pekalongan selaku sasaran kebijakan. Adapun data dari unsur masyarakat adalah masyarakat Kota Pekalongan sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan pengelolaan limbah batik Kota Pekalongan. Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada para informan, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang sifatnya lebih jelas mengenai keberhasilan kebijakan pengelolaan limbah batik Kota Pekalongan. Sedangkan data sekunder berasal dari data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi ulasan-ulasan terhadap data primer. Dokumen yang diperlukan untuk data sekunder meliputi buku-buku referensi (jurnal, pustaka umum, hasil-hasil penelitian), surat kabar, majalah ilmiah, dokumen resmi lembaga terkait serta data statistik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif oleh Huberman dan Miles (Idrus, 2009). Model ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan diperlukan untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan dan sebagai bahan masukan untuk kebijakan masa yang akan datang. Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan Bridgman & Davis, maka penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan akan diuraikan melalui empat indikator pokok yaitu: *input*, *proses*, *output* dan *outcome*.

Input Kebijakan

Input kebijakan merupakan suatu masukan yang memberikan penilaian terhadap suatu sumber daya pendukung dan sumber-sumber daya dasar yang diperlukan guna melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan dan kegagalan suatu input kebijakan pengelolaan limbah batik dianalisis berdasarkan hasil-hasil temuan yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan dana dan ketersediaan fasilitas. Tingkat keberhasilan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena sumberdaya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan serta masyarakat Kota Pekalongan yang terdiri dari pengusaha batik.

Jumlah staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah usaha batik di Kota Pekalongan membuat perlunya penambahan jumlah staf yang khusus menangani limbah. Mengingat pengelolaan limbah merupakan proses yang tidak mudah dan membutuhkan keterampilan khusus maka diperlukan tenaga yang terlatih untuk menangani pengelolaan limbah. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan, pegawai sudah beberapa kali mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Selain itu, keseriusan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengatasi permasalahan limbah ini ditunjukkan dengan adanya pelatihan yang ditujukan untuk pengusaha batik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan tentang bagaimana melakukan proses produksi bersih untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan. Pelatihan ini secara rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola limbah sebelum dibuang ke sungai.

Selain ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten, Pemerintah Kota Pekalongan juga menyediakan dana untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik yang besumber dari APBD Kota Pekalongan dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah batik tersebut dana yang dianggarkan sudah mencukupi. Namun, melihat kondisi yang ada sekarang ini dimana daya tampung IPAL Komunal belum dapat menjangkau seluruh pengusaha batik di Kota Pekalongan maka diharapkan adanya penambahan anggaran guna penambahan IPAL Komunal maupun IPAL skala rumah tangga.

Jumlah IPAL sebagai fasilitas pengolah air limbah tidak sebanding dengan jumlah industri yang ada. Daya tampung IPAL belum mampu menampung limbah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan lahan baru untuk pembuatan IPAL komunal. Meskipun demikian, pemerintah sudah memenuhi fasilitas pendukung pada masing-masing IPAL komunal yang meliputi peralatan IPAL, pompa air, bahan-bahan kimia untuk proses IPAL. Pemerintah juga mempunyai laboratorium analisa air yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan di laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, terdapat pula laboratorium keliling dengan alat portable, reagen serta alat analisa air dengan 8 parameter yaitu COD, BOD, TSS, Amoniak, CU, Mn, Sianida, dan Fenol.

Perlengkapan laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan juga termasuk memadai. Keberadaan perlengkapan laboratorium ini sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam rangka Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya laporan panduan dan pemantauan kualitas air serta Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan DLH secara berkesinambungan dapat memantau kondisi air serta lingkungan yang ada di Kota Pekalongan. Sehingga, jika terdapat pencemaran lingkungan terutama air maka dapat segera diantisipasi.

Proses Kebijakan

Proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi metode yang digunakan serta efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik. Proses pengolahan limbah cair industri mencakup proses fisik, kimia, biologis dan atau kombinasi dari ketiga proses tersebut tergantung dari jenis dan kualitas limbahnya serta tujuan dari pengolahan yang dilakukan. Tujuan pengolahan limbah adalah agar air yang tidak memenuhi syarat kesehatan menjadi memenuhi syarat kesehatan sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat maupun merusak lingkungan.

Pemerintah Kota Pekalongan sudah menghimbau kepada masyarakat Kota Pekalongan terutama pengusaha batik untuk melaksanakan pengolahan limbah cair dengan menerapkan proses produksi bersih menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan. Dengan demikian limbah yang dihasilkan memiliki kadar bahan berbahaya yang lebih sedikit sehingga dapat langsung dibuang ke sungai. Namun, para pengusaha batik enggan menerapkan proses produksi bersih pada usahanya karena berdampak pada pendapatan yang mereka peroleh. Menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan akan menambah biaya produksi sehingga akan mengurangi keuntungan yang diperoleh.

Selain menggunakan metode produksi bersih, Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan pengelolaan limbah melalui IPAL. Metode pengelolaan limbah dengan IPAL di Kota Pekalongan sudah menggunakan teknologi canggih dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah yang ada. Kendalanya pembuatan IPAL ini membutuhkan lahan serta dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah membuat program pembuatan IPAL mini skala rumah tangga sebagai jalan keluarnya. Pembuatan IPAL mini tidak membutuhkan lahan yang luas dan dana nya juga lebih sedikit dibandingkan komunal. Pemasalahannya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah serta pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah yang masih kurang membuat pemerintah harus ekstra kerja keras agar hasil yang diperoleh maksimal.

Metode yang digunakan dalam pengelolaan limbah batik dengan membangun IPAL komunal sebenarnya merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah batik.. Pada awalnya pemerintah hanya membangun IPAL Komunal berjumlah 2 (dua) buah yang berlokasi di sentra-sentra industri batik yaitu di Kecamatan Jenggot dan Kampung Batik Kauman. Metode yang digunakan pun sudah modern dan menggunakan teknologi terkini. Akan tetapi, daya tampung IPAL Komunal ini belum mampu menampung semua limbah yang dihasilkan di kedua daerah sentra batik tersebut. Selain itu, lokasi industri batik yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan juga menjadi salah satu hambatan dimana industri yang letaknya jauh dari IPAL Komunal maka secara otomatis tidak dapat menikmati fasilitas pengelolaan limbah dari pemerintah tersebut.

Selain metode, untuk melihat keberhasilan proses kebijakan juga dapat dilihat melalui efektivitas dan efisiensi kebijakan. Penjelasan mengenai efektivitas dan efisiensi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan dapat kita lihat dari beberapa aspek diantaranya adalah: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, pencapaian hasil serta ketepatan alokasi anggaran. Tujuan dari

kebijakan pengelolaan limbah batik ini adalah mengurangi jumlah bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam limbah sehingga tidak mencemari lingkungan ketika dibuang. Namun, belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur mengenai pengelolaan limbah membuat tujuan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan juga tidak jelas. Peraturan yang mendasari pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan hanya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga tujuan yang tertera masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas mengenai pengelolaan limbah batik.

Pencapaian hasil kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan juga belum sesuai dengan yang diharapkan. Fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan belum semua limbah yang dihasilkan melalui proses pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan. Jumlah industri batik di Kota Pekalongan banyak dan tersebar di seluruh Kota Pekalongan sehingga masih banyak yang belum mendapatkan fasilitas pengelolaan limbah. Hasil yang dicapai saat ini hanya sebatas pembangunan IPAL komunal yang ada di Kampung Batik Kauman dan Kecamatan Jenggot serta 55 buah IPAL mini sedangkan jumlah industri batik ribuan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil kebijakan pengelolaan limbah batik masih kurang maksimal.

Indikator proses kebijakan berikutnya adalah efisiensi dengan melihat ketepatan alokasi anggaran. Jika input dana sesuai dengan output kebijakan maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut sudah efisien. Anggaran untuk kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan sudah dianggarkan untuk beberapa kegiatan pengelolaan limbah seperti pembuatan IPAL Komunal, IPAL mini serta sosialisasi. Dana yang diperoleh sudah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Memang secara perhitungan angka, tidak dapat dilihat keuntungan yang diperoleh. Namun, jika kita melihat jangka panjang maka manfaat yang akan diperoleh sangat besar sekali. Bayangkan jika pemerintah tidak inisiatif membangun IPAL Komunal, maka yang terjadi adalah pencemaran lingkungan akan lebih parah dari sekarang ini karena tidak terdapat proses untuk mengurangi bahan-bahan kimia yang berbahaya yang terkandung dalam limbah.

Output Kebijakan

Output kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dihasilkan dari kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan. Untuk menjelaskan mengenai output kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan kita akan melihat dalam beberapa bagian meliputi pencapaian tujuan, kesesuaian hasil dan tujuan, pencapaian target, serta progress kebijakan.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2010 hingga sekarang, kebijakan pengelolaan batik di Kota Pekalongan sudah memberikan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hasil yang dapat dinikmati diantaranya adalah pembangunan IPAL Komunal yang berada di Kelurahan Jenggot dan Kampung Batik Kauman. Hasil yang dicapai oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam pengelolaan limbah batik sebenarnya telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan akan tetapi hasil tersebut belum maksimal. Pengusaha batik yang tinggal di sentra industri yang terdapat IPAL Komunal maupun yang memiliki IPAL mini skala rumah tangga bersedia membuang limbahnya ke IPAL Komunal. Akan tetapi, karena keterbatasan daya tampung IPAL tersebut, maka tidak semua limbah dari pengusaha batik mampu ditampung.

Hasil kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan masih belum sesuai dengan tujuannya. Tujuan adanya kebijakan pengelolaan limbah batik ini adalah semua industri batik di Kota Pekalongan mengelola limbahnya sebelum dibuang agar limbah tersebut tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Namun, yang terjadi sekarang ini masih banyak pengusaha yang belum melengkapi usahanya dengan IPAL. Meskipun Pemkot Pekalongan sudah mengupayakan

pembangunan IPAL Komunal namun letak serta dayaampungnya masih kurang memadai sehingga belum dapat menjangkau seluruh industri batik yang ada di Kota Pekalongan.

Jumlah peserta dalam kebijakan pengelolaan limbah batik selalu mengalami penambahan tiap tahunnya. Karena tidak mungkin melakukan penambahan jumlah peserta IPAL Komunal maka Pemkot Pekalongan beralih melalui metode IPAL mini. Setiap tahun DLH Kota Pekalongan telah melakukan penambahan jumlah IPAL mini. Penambahan jumlah IPAL mini selalu mengalami penambahan dan selalu mencapai target yang ditetapkan tiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah tersebut belum menjangkau seluruh industri yang ada karena masih terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebenarnya pemerintah mengajak kepada para pengusaha batik untuk mempunyai IPAL sendiri meskipun sederhana agar permasalahan limbah bisa diatasi tanpa hanya mengandalkan dari pemerintah. Hal inilah yang dirasa masih sulit untuk dipenuhi karena belum adanya kesadaran dari para pengusaha batik.

Progres kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang selalu mengalami kemajuan tiap tahunnya. Kemajuan tersebut dapat dilihat melalui penambahan jumlah dana tiap tahunnya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah. Bagi pengusaha batik kemajuan atau *progress* kebijakan yang dapat mereka rasakan yaitu melalui pengembangan yang dilakukan tiap tahunnya pada IPAL Komunal baik dari segi peralatan maupun peningkatan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengolah limbah.

Outcomes Kebijakan

Outcomes (dampak) memfokuskan diri pada dampak yang akan diterima oleh masyarakat luas akibat kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif. Kebijakan pengelolaan limbah batik yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai manfaat yang dapat dinikmati oleh penduduk Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun penduduk lainnya. Manfaat kebijakan pengelolaan limbah batik yang dapat diterima oleh pengusaha batik diantaranya adalah lingkungan sekitarnya menjadi lebih bersih karena berkurangnya pencemaran serta usahanya mendapat pengakuan sebagai usaha yang ramah lingkungan. Akan tetapi, manfaat adanya kebijakan pengelolaan limbah di Kota Pekalongan masih belum bisa dirasakan oleh pengusaha batik. Banyak pengusaha yang limbah industrinya masih tetap dibuang langsung ke sungai melalui selokan tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan fasilitas pembangunan IPAL baik komunal maupun skala rumah tangga belum menjangkau seluruh industri batik yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan pengusaha batik belum mengetahui adanya kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan sehingga masih banyak pengusaha yang belum mengetahui mengenai pengelolaan limbah.

Dalam hal konsistensi Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik sudah baik. Namun, sebaliknya konsistensi dari masyarakat terutama pengusaha batik justru belum berjalan dengan semestinya. Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi namun apabila tidak disertai dengan kesadaran masyarakat maka kebijakan tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Untuk itu, harus terdapat sanksi yang tegas kepada industri yang mencemari lingkungan agar pengusaha batik lebih patuh dengan ikut serta dalam program tersebut dan tidak akan membuang limbahnya sembarangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap *Input, Process, Output, Outcomes* dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan tidak berhasil. Hal ini disebabkan adanya beberapa indikator yang belum berhasil dicapai atau dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut: (1)Ketersediaan sumber daya manusia, (2)Ketersediaan dana, (3)fasilitas yang kurang memadai, (4)ketidakefektifan metode yang digunakan, (5)ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai

karena belum adanya peraturan yang jelas, (6)pencapaian hasil yang kurang maksimal, (7)ketidakesesuaian antara hasil dan tujuan yang ditetapkan, (8)jumlah peserta kebijakan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan, (9)pengaplikasian kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang sulit diterapkan, (10)manfaat hasil kebijakan pengelolaan limbah batik yang belum dinikmati oleh masyarakat Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun masyarakat pada umumnya serta (11)Konsistensi masyarakat Kota Pekalongan terutama pengusaha batik yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa langkah yang harus ditempuh diantaranya dukungan payung hukum yang lebih tegas sebagai upaya mengatasi inkonsistensi pengusaha batik dalam melaksanakan kebijakan, menjalin kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan limbah batik, serta meningkatkan sinergi antara masyarakat, pengusaha batik dan pemerintah dalam menangani masalah pengelolaan limbah batik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Prajudi S. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Siagian, Sondang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoah, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Wahyudi, Isa. 2008. *Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis*, Malang: In-TRANS Publishing.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta:Raja Grafindo.